

INTISARI

Pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa pemutakhiran data Wajib Pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman di Kabupaten Sukoharjo telah dilaksanakan oleh BPKPAD Kabupaten Sukoharjo melalui pendataan administrasi dan pemanfaatan data instansi terkait, namun pelaksanaannya belum berjalan optimal dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari BPKPAD Kabupaten Sukoharjo serta data sekunder lain dari BPS dan DPMPTSP.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara jumlah pelaku usaha makanan dan/atau minuman berdasarkan data BPS dan OSS dengan jumlah Wajib Pajak PBJT yang terdaftar dan aktif di BPKPAD Kabupaten Sukoharjo. Kondisi ini mengindikasikan bahwa basis data Wajib Pajak belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan, sehingga potensi penerimaan PBJT belum tergali secara maksimal. Pemutakhiran data Wajib Pajak memberikan kontribusi terhadap peningkatan potensi penerimaan PBJT melalui penambahan dan validasi data Wajib Pajak, namun dampaknya belum sebanding dengan pertumbuhan sektor usaha kuliner. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya, rendahnya kepatuhan Wajib Pajak, serta belum optimalnya integrasi data antarinstansi. Oleh karena itu, pemutakhiran data Wajib Pajak menjadi faktor penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata kunci: Pemutakhiran data, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Wajib Pajak, Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Sukoharjo.

ABSTRACT

This study shows that the updating of data on taxpayers subject to Specific Goods and Services Tax (PBJT) on food and/or beverages in Sukoharjo Regency has been carried out by the Sukoharjo Regency BPKPAD through administrative data collection and the utilization of data from relevant agencies, but its implementation has not been optimal and sustainable. The research method used is a qualitative descriptive approach utilizing secondary data from the Sukoharjo Regency BPKPAD as well as other secondary data from BPS and DPMPTSP.

The results of the study show that there is a significant gap between the number of food and/or beverage businesses based on data from BPS and OSS and the number of PBJT taxpayers registered and active at BPKPAD Sukoharjo Regency. This condition indicates that the taxpayer database does not fully reflect the real conditions in the field, so that the potential for PBJT revenue has not been maximized. Updating taxpayer data contributes to increasing the potential for PBJT revenue through the addition and validation of taxpayer data, but the impact is not yet proportional to the growth of the culinary business sector. The main obstacles faced include limited resources, low taxpayer compliance, and suboptimal data integration between agencies. Therefore, updating taxpayer data is an important factor in supporting the optimization of local tax revenue and increasing Local Own-Source Revenue (PAD).

Keywords: Data updating, Specific Goods and Services Tax (PBJT), Taxpayers, Local Revenue, Sukoharjo Regency.